



Pemkot Minta Polisi Selidiki Iklan Aborsi

YOGYAKARTA - Pemkot Yogyakarta minta pihak kepolisian menyelidiki iklan yang diduga tawarkan jasa aborsi. Pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti iklan yang meresahkan warga ini.

"Nantinya kepolisian dan Satpol PP bisa bekerja sama untuk menindak," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyono kemarin.

Menurut dia, maraknya poster iklan asusila yang ditempel ilegal di tiang rambu lalu lintas harus menjadi perhatian bersama. Selain di khawatirkan memengaruhi masyarakat untuk melakukan

tindakan negatif, pemasangan poster juga melanggar Perda Kota Yogyakarta 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda No 18/2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Dirinyapun telah memerintahkan Satpol PP untuk mencopot poster iklan tersebut. "Kami akan copoti iklan-iklan ini. Kami juga akan minta pihak terkait menelusuri otak penempel iklan itu. Kami siap membantu," tandasnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhi Hartana mengaku telah rutin menertibkan iklan serupa. Namun usai dibersihkan, keesokan harinya

kembali muncul dan tertempel lagi.

"Kali ini kami upayakan akan menangkap tangan pelaku penempelnya," janjinya.

Nurwidhi juga mengakui, anggotanya pernah menyelidiki iklan tersebut dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di poster iklan. Hanya saja, belum pernah membuahkan hasil.

Diketahui, komunitas Jogja Garuk Sampah mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Rabu (1/2). Komunitas yang fokus terhadap isu lingkungan dan kebersihan itu minta Pemkot Yogyakarta

menertibkan iklan asusila yang semakin hari semakin marak tertempel di rambu lalu lintas.

"Tulisannya memang singkat, telat datang bulan dan nomor telepon. Tapi setelah kami telusuri dan menghubungi nomor tersebut, berindikasi itu modus untuk jasa aborsi," kata Koordinator Jogja Garuk Sampah Bakti Maulana saat mengadu ke Forpi Kota Yogyakarta.

Bekti mengaku, komunitasnya terpaksa mengadu ke Forpi karena aduan yang dilayangkan sebelumnya ke Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota

Yogyakarta, sama sekali tak direspons. Komunitasnya khawatir, jika sampah visual ini terus dibiarkan, dapat mencoreng citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Terlebih, sampah visual yang ditempel di tiang *traffic light* itu mudah diakses oleh masyarakat usia dewasa hingga anak kecil.

"Jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah, justru menimbulkan kesan pemerintah membiarkan budaya seks bebas dan tindak asusila. Pemerintah juga harus menelusuri pihak yang memasang iklan tersebut," tandasnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005